

ISSN : 1693-7287

J
u
r
n
a
l

KEWARGANEGARAAN

Volume 19 : Nomor 02, Nopember 2012

Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam
Hapni Laila Siregar

Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran IPS di SD
Risma Sitohang

Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda
Ramsul Nababan

Trafficking dan Kemiskinan Perempuan
Murni Eva Marlina

Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal
Budi Ali Mukmin Sarumpaet

Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Dalam Memerangi Terorisme
Prayetno

Demokrasi Etnis Dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural di Indonesia
Surya Dharma

Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
di Kabupaten Bangka
Yuli Tirtariandi El Anshori dan Ayi Kiryana

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Ramsul Nababan, SH

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221


Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002


E-mail PPKn@Plasa.com


Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan "Jurnal Kewarganegaraan".

Pengantar Redaksi iii


Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

 Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam
Hapni Laila Siregar..... 1


 Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran IPS di SD
Risma Sitohang..... 14


 Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda
Ramsul Nababan..... 26

Analisis Hukum

 *Trafficking* dan Kemiskinan Perempuan
Murni Eva Marlina..... 42

Wacana Demokrasi dan Politik

 Politik Identitas Etnis Dalam Kontentasi Politik Lokal
Budi Ali Mukmin Sarumpaet..... 53

 Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Dalam Memerangi Terorisme
Prayetno..... 62

 Demokrasi Etis Dalam Kehidupan Multikultural di Indonesia
Surya Dharma..... 79

 Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di
Kabupaten Bangka
Yuli Tirtariandi Anshori dan Ayi Karyana..... 95

Pengantar **Redaksi**

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 19 Nomor 02 Nopember 2012 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 19 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran" yang membahas tentang Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam yang diangkat oleh **Hapni Laila Siregar** secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan aktivitas pendidikan karena dengan pendidikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dapat tercapai. Sejak kedatangannya Islam telah mengembangkan beberapa lembaga pendidikan mulai dari yang informal seperti kuttab dan masjid, juga yang formal yaitu madrasah. Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengutamakan pengajaran baca-tulis. Masjid di samping sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pengajaran al-quran dan hadits. Madrasah lebih diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Disini diajarkan beragam ilmu seperti tafsir, fiqh, kalam, bahasa Arab, sastra, astronomi dan ilmu kedokteran.

Rubrik "Analisis Hukum", yang mengangkat isu tentang Trafficking dan Kemiskinan Perempuan yang dibahas oleh **Murni**

Eva Marlina secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan salah satu fenomena global yang terjadi pada masyarakat hingga membuat terjepit dalam ekonomi yang sangat sulit. Dalam pandangan sehari-hari kemiskinan telah menjadi potret bangsa kita bahkan sangat sering mewarnai surat kabar, media cetak, media elektronik. Dalam potret kemiskinan ini kaum perempuan yang menjadi dominan sosok kemiskinan. Padahal setiap orang memiliki bakat dan keahlian dalam dirinya hanya kadangkala lupa menggali potensi yang ada pada dirinya. Tujuan tulisan ini untuk mencari solusi dan mengatasinya dengan menganalisa, mengamati, dan menggunakan studi pustaka untuk mengetahui penyebab terjadi trafficking. Artinya menggunakan teori-teori pendukungnya. Selain itu manfaat tulisan ini untuk meningkatkan rasa kepedulian ilmuwan terhadap trafficking, memberi pandangan tentang trafficking, dan mencari solusi mengatasinya yang telah menjadi salah satu masalah pada masyarakat terutama bangsa kita.

Sedangkan rubrik “Wacana Demokrasi dan Politik” yang di tulis oleh **Budi Ali Mukmin Sarumpaet**, mengangkat Issu yang berkaitan dengan demokrasi dan politik tentang Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa politik desentralisasi yang lahir pada masa reformasi justru membangkitkan gairah sentimen politik identitas etnis yang berkontribusi besar munculnya raja-raja kecil disetiap daerah. Pemikiran Schmitterian menjelaskan dengan adanya liberalisasi politik maka akan kembali mengaktifkan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang ataupun dari pihak ketiga. Pada tingkatan kelompok etnis setidaknya liberalisasi dapat dilihat dari terciptanya ruang-ruang bagi setiap masyarakat untuk membentuk sebuah komunitas yang dirasakan dapat melindungi hak-haknya, dan berkurangnya campur tangan negara terhadap segala bentuk apresiasi politik setiap kelompok.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian dalam bidang pendidikan dan kewarganegaraan, hukum dan sosial politik kenegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang pendidikan dan kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi



INTERNALISASI NILAI KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA

Oleh: Ramsul Nababan*

Abstract

The internalization of the character values to the young generation is an important thing to do. It is hoped that the developing of the values and character can give good influence to their mental and attitudes. The main target of this effort is to change the youth mind-set about the political education particularly the political ethic. It is written in our history since the congress II of the youth oath till the reformation era, young people had played an important role in giving contribution toward the political movement in Indonesia. The youth strength in holding the holy national values in the political field sometimes is disturbed by the temptation of the pragmatic politicians. If the values of the character can be understood and actualized since the earlier time, the possibilities to create leaders who are honest, responsible and have high loyalty will be bigger. The values of the character should give the best contribution in changing the mind-set of the youth political view toward political education which is fair and responsible. Kartono said (2009:100) “..... logical thinking-goodness, ethics-good manners and character must be in succession and has interconnection with the human and political conception. Therefore an analysis and deeper discussion about the internalization of the character values to the youth political education is really an important thing to do.

Keywords: Character Value, Political Education

A. PENDAHULUAN

Pembangunan karakter bukan saja menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang secara faktual masih berusia muda tetapi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat beranekaragam latar belakang sosial, usia, maupun jenis pekerjaannya. Konsistensi bangsa Indonesia dalam pengembangan pendidikan karakter secara imperatif tertuang dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

* *Ramsul Nababan, SH adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*



untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Merujuk pada tujuan Undang-undang Pendidikan Nasional yang sangat sarat dengan nilai, maka setiap orang tanpa terkecuali hendaknya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai karakter khususnya bagi generasi muda. “Sesungguhnya ditangan pemuda terletak nasib umat dan dalam keberaniannya terletak hidup Bangsa, Pemuda adalah calon penghuni masa depan, ia adalah gambaran masa depan sebuah negara bangsa”. (Presiden pertama RI).

Kalau dilihat lebih mendalam, pemuda pada garis besarnya mempunyai peranan sebagai *agent of change*, *agent of development* dan *agent of modernization*. Sebagai *agent of change*, pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat kearah perubahan yang lebih baik. Sedangkan *agent of development*, pemuda memiliki peranan melancarkan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebagai *agent of modernization*, pemuda bertugas dan bertindak sebagai pelopor dalam pembaharuan. Mengingat pentingnya peran strategis pemuda, untuk itu, perlulah ada sebuah analisa serta pembahasan lebih dalam mengenai internalisasi nilai karakter terhadap pendidikan politik generasi.

B. HAKIKAT PENDIDIKAN NILAI/KARAKTER DALAM PENDIDIKAN POLITIK

Penanaman nilai-nilai sosial dapat dikembangkan baik di dunia pendidikan, maupun masyarakat dengan cara mengajak setiap orang untuk memahami *naturalsettings* dari masalah-masalah kemasyarakatan dan menempatkannya dalam proposinya, serta merumuskan teknik-teknik pemecahan masalah yang dapat memunculkan keterampilan sosial tingkat tinggi



pada diri seseorang seperti: keterampilan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, berkompromi, menerima dan memberi, inquiry, dan menjustifikasi sesuatu masalah secara objektif. Pengembangan ini didasarkan atas tuntutan relevansi nilai-nilai sosial tersebut menjadi satu nilai kebajikan yang dikembangkan melalui berbagai macam cara, sehingga dapat mengubah pola pikir serta perbuatan yang dapat memiliki makna dalam bingkai pendidikan nilai

Mulyana (2004:119) mengartikan pendidikan nilai sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang, Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suriteladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai kehidupan yang didalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Secara umum menurut Mulyana (2004:119) pendidikan nilai yang dimaksud untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik. Selanjutnya, Milton menyatakan bahwa esensi pendidikan nilai adalah membina, mengembangkan kepercayaan dan sistem nilai yang menjadi potensi manusia, sehingga menjadi nilai yang terorganisir pada dasar budaya masyarakat, instansi dan personal.

Dari beberapa pengertian mengenai pendidikan nilai di atas, integrasi pendidikan nilai kedalam pendidikan-pendidikan lainnya selayaknya harus dijadikan sebagai suatu terobosan dalam penggemblengan mental pemuda pada saat ini. Begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perilaku pemuda dewasa ini, mulai dari pergaulan bebas, narkoba, sampai kepada etika politik serta kesadaran politik harus dijadikan menjadi agenda



utama sehingga dapat. menciptakan pemuda sebagai *agent of change, agent of development dan agent of modernization*.

Pada hakikatnya, pendidikan nilai/karakter di dalam pendidikan politik sudah terinternalisasi melalui etika politik maupun moral politik. Selanjutnya, apa yang menjadi perbedaan antara etika politik dan moral politik :

1. Pengertian Etika politik

Secara substansif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa “moral” senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai subjek manusia. maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Oleh karena itu aktualisasi etika politik senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebaga manusia (Suseno. 1987:5).

2. Perbedaan Etika politik dan Moral Politik

Ada perbedaan antara etika dan moral atau moralitas. Setiap orang, tanpa memandang tingkat peradabannya, mempunyai moralitasnya sendiri, yakni seperangkat preskripsi atau pedoman yang membimbingnya ke arah tindakan moral tertentu. Etika merupakan olahan secara ilmiah atau filosofis atas moralitas. Obyek material etika adalah kehendak sadar: kebebasan tindakan manusia. Ini merupakan daya-daya pada diri manusia yang memungkinkannya mempreskripsikan kaidah-kaidah. Jadi, tindakan, menurut sorotan etika, adalah



sesuatu yang dilakukan secara bertanggungjawab dan bukan sesuatu yang bersumber pada ketidaktahuan, apalagi keterpaksaan dari pelakunya.

Cakupan etika meliputi referensi tindakan bebas manusia, asas dan dasar untuk memahami munculnya tindakan (misal: hukum, suara hati, kebaikan), keterkaitan antara akibat tindakan dan konteks tindakan (misal: hukuman). Obyek formal etika --hal yang menjadikan etika sebagai terang atas kehendak bebas manusia-- adalah ukuran tentang kebaikan moral atau keberaturan yang dilibatkan ke dalam tindakan manusia. Jadi, etika bersinggungan dengan tatanan yang berlaku bagi manusia sebagai manusia atau secara manusiawi, sehingga memungkinkannya menjadi manusia yang baik: manusia dengan kemanusiaannya.

Moralitas di balik tindakan politik berkaitan dengan tindakan moral politisi, tetapi, tak sebagaimana etika, moral politik sudah memiliki dasar-dasarnya secara kodrati (supernatural) apalagi jika dikaitkan dengan ikhtiar pencarian yang tak berkesudahan atas kebenaran. Etika dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain yang berurusan dengan *moral conduct* manusia -- sebagai *jurisprudence* dan *pedagogy*-- dalam hal bahwa etika menjadi acuan dan mensubordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Dalam dunia politik peranan etika politik sangat penting. Terkait dengannya, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Apa yang disebut sebagai dasar pertimbangan bukanlah berada pada cakupan *jurisprudence* atau *pedagogy* dari moral politik saja, tetapi seharusnya berdasarkan pada etika.

Tatkala kondisi moralitas politik memungkinkan apa yang dianggap benar untuk kasus pada waktu tertentu tetapi menjadi salah pada kasus lain di waktu lain, maka sistem kenegaraan ini sedang mengabaikan kemungkinan bahwa seorang diktator akan muncul kembali untuk menyalahgunakan



kekuasaannya, atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan moralitas personalnya (*dalam arti beyond his term of office*). Sebaliknya, semakin banyak kekuasaan yang membebaninya, sementara kekuasaan itu menjadi baju untuk lebih berkuasa, maka ia akan menyalahgunakan sekaligus tetap mempertahankan kekuasaan itu.

C. INTERNALISASI NILAI KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA

Maraknya perilaku buruk dimasyarakat akhir-akhir ini dapat dijelaskan secara sosiologi karena memiliki ikatan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membawa situasi reformasi ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejala tersebut (Wirutomo, 2001 dalam Budimansyah, 2010:6).

Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbanganya struktur kekuasaan” otokrasi” yang memainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya). Beberapa fakta dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi diparlemen.
2. Kekuasaan Kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas



3. Kekuasaan hukum formal dikuasai oleh para praktisi dan penegak hukum yang dengan kepiawaiannya dan/atau wewenangnya bisa mengatur siapa salah siapa benar
4. Sebagian besar uang di negeri ini berada di tangan sekelompok kecil orang yang justru sedang terpojok secara politis.
5. Sekelompok kecil elit daerah memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri,
6. Kelompok aktivis vocal yang sering melakukan aksi demo dengan nama kepentingan rakyat banyak dengan cara-cara yang kali justru memuakkan rakyat kebanyakan (main hakim sendiri, melakukan tindakan kekerasan, sweeping, membenturkan massa dengan aparat keamanan dan sebagainya).

Kedua, sumber terjadinya perilaku buruk dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*). Gejala ini muncul dan menjadi pasca runtuhnya rezim orde baru. Dari beberapa permasalahan di atas, ternyata sangatlah penting bagaimana menginternalisasi nilai-nilai karakter di berbagai bidang, khususnya pendidikan politik. Hal ini karena unsur terpenting dalam politik ialah moralitas. Jika politik, partai dan Negara tidak berakar pada moralitas, maka dunia manusia akan mengalami kehancuran; sebab selalu dilanda badai topan konflik, kesewenang-wenangan, peperangan dan upaya pemusnahan. Sejarah membuktikan, bahwa memerintah dengan kekerasan dan kekejaman itu tidak membuat situasi masyarakat menjadi lebih tenang dan “manut”, melainkan membuat kondisinya menjadi runyam, geger dan memberontak.

Dengan memberikan pemahaman yang benar dengan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter melalui pendidikan politik maka kita akan menciptakan generasi yang bermoral ketika dia memasuki kancah politik



nantinya. Oleh karena itu, dalam kondisi bagaimanapun juga, bagi pemuda, politik itu harus dituntun oleh moral, agar para pelaksana politik tidak menjadi sewenang-wenang, mau kuasa sendiri dan menang sendiri. Maka kesadaran moral ini perlu ditumbuhkan secara subur di hati sanubari generasi muda. Sebab dalam demokrasi peran serikat pemuda sangatlah dibutuhkan demi menjalankan nilai-nilai demokrasi kearah yang lebih baik dan benar.

Kita tidak mau, ketika generasi muda sekarang atau yang akan datang duduk dipemerintahan nantinya, kalau mereka menggunakan kekuasaan demi kepentingan rakyat, maka kekuasaan mereka itu nantinya keropos, tidak abasah dan menyalahi konvensi yang telah disetujui bersama. Selanjutnya, agar kekuasaan itu menjadi kekuatan moral yang mampu memerintah dengan adil dan membahagiakan rakyat banyak, maka diperlukan pemimpin yang bermoral. Hal ini dapat terwujud apabila adanya internalisasi nilai-nilai karakter pendidikan politik kepada generasi muda sejak dini.

D. STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MENANAMKAN NILAI KARAKTER KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA.

1. Penanaman Nilai Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pendidikan Politik Generasi Muda.

Perubahan yang terjadi di dunia, dewasa ini terasa begitu cepat, sehingga berakibat pada tatanan yang telah ada didunia ini berubah, sedangkan disisi lain tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini berakibat pada sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang, Nilai-nilai yang selama ini menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya Hal itu menimbulkan kebingungan dan akhirnya menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik sekaligus juga mempengaruhi bidang moral dan sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang termasuk negara kita Indonesia. Guna mengantisipasi kondisi tersebut di atas, pemerintah perlu



membuat tindakan yang signifikan agar tidak menuju suatu kondisi yang lebih memprihatinkan, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu melalui bidang pendidikan. Adapun upaya di bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di bidang kurikulum yang diharapkan mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut.

Konsistensi bangsa Indonesia dalam pengembangan pendidikan karakter secara imperative tertuang dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan agar tercapainya pendidikan politik generasi muda merupakan sesuatu yang sangatlah tepat. Pendidikan politik yang diajarkan di dalam pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai pegangan dalam menciptakan kondisi dimana generasi muda dapat memahami etika politik yang lebih bijak dan transparan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana pengembangan nilai karakter dalam pendidikan kewarganegaraan, agar pendidikan politik yang disampaikan dapat terarah terhadap perubahan sikap generasi muda khususnya mahasiswa. Menurut Malik Fajar (2004:4) sejak tahun 1994, pembelajaran PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (instrumental input) terutama yang



berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Menurut Suryadi A dan Budimansyah D. 2007 : 313) Kalaulah dapat dipahami, di abad-21 ini Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang ada disekolah memiliki beberapa tantangan yaitu

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”.
2. Menumbuhkan budaya dan kehidupan demokratis (*cultural democracy*) pada berbagai komponen masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan.
3. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa.

Secara historis dan sosio cultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Ketika kita lihat sejarah perkembangannya, Presiden Soekarno adalah tokoh yang pertama kali melontarkan pentingnya masalah *nation building* ini dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1957. Beliau melihat *nation building* sebagai fase kedua dalam revolusi Indonesia sesudah fase pertama yang dinamakan *liberation*, yaitu pembebasan Indonesai dari penjajahan Belanda. Pentingnya karakter bangsa pada saat itu melihat kondisi Negara yang terpecah-pecah oleh suku, daerah, ras serta agama. Ketika itu *character building* dihubungkan dengan *nation building*. Pada era ini, *focus study character building* diarahkan kepada pengakuan terhadap hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat yang pluralis dan demokratis, sebagai upaya agar hak-hak tersebut dapat diimpelentasikan.



Dengan demikian maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan nilai-nilai karakter pada pendidikan politik dan moral bangsa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat.

2. Penanaman Nilai Karakter Melalui Organisasi Kepemudaan Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda

Pemuda bagi Bangsa Indonesia adalah kelompok usia yang memiliki nilai serta posisi yang strategis dalam masyarakat. Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia selalu menyertai pemuda yang baik diminta maupun secara sukarela aktif di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, sering kali berbagai moment penting bagi Bangsa Indonesia lahir dari ide, semangat dan kepemimpinan para pemuda. Pemuda yang karena penggolongan usianya, memang selalu berpikir jernih dan bebas dalam menuangkan segala bentuk ide serta gagasannya kepada bangsa dan negara. Katakanlah peristiwa penting bangsa seperti Sumpah Pemuda, persiapan dan pelaksanaan Kemerdekaan RI, atau peristiwa sekitar tahun 1965 yang semuanya melibatkan peran aktif pemuda. Bagi pemuda berbagai peran serta yang dilakukan terhadap sejarah perjalanan bangsa memiliki catatan-catatan tersendiri.

Pemuda Angkatan '28 mencetus Sumpah Pemuda adalah mereka yang berumur antara 15-23 tahun yang ditinjau dari segi pendidikan umumnya duduk di kelas akhir HIS (*Hollandsc Inlandsche School*), *MULO* atau *HBS 5 tahun*, dan *AMS (Algemene Middelbaar School)*. Mereka yang duduk di Hoogere School atau sekolah tinggi atau universitas, cenderung dikatakan bukan pemuda lagi, mereka sudah tokoh nasional. Karena itu takkala Kasman Singodimedjo tampil sebagai Ketua JIB ketika sudah berusia 28 tahun mendapat kritik dari sementara tokoh JIB sendiri karena dianggap sudah tua.

Salah satu bentuk organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia adalah KNPI (Komite Nasional Pemuda Inonesia. Taufik (2003) mengemukakan :



“Kelahiran UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan melahirkan implikasi-implikasi terhadap keberadaan dan posisi KNPI serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Pemufakatan antara pemimpin organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) pada akhirnya semakin memantapkan posisi KNPI sebagai wadah tunggal organisasi kepemudaan yang ada di tanah air”.

Dalam Undang-Undang Keormasan No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas Pasal 1 menyebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarakan Pancasila.

Selanjutnya Fungsi Ormas (Pasal 5) yaitu wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, pembinaan dan pengembangan anggotanya, peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional, sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi sosial diantara anggotanya atau sesama ormas atau dengan organisasi kekuatan sosial politik atau Pemerintah atau dengan yang lainnya. Dan di Pasal 8 disebutkan untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Sedangkan di dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud pembinaan dalam satu wadah: satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk organisasi kemasyarakatan pemuda dalam wadah KNPI, untuk organisasi kemasyarakatan tani dalam wadah HKTI, dsb.

Organisasi kepemudaan juga memiliki fungsi sebagai sosialisasi politik. Menurut Budiardjo. (2008:407) “Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat



dimana ia berada”. Defenisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992, dalam Budiardjo. 2008:407) : Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik”.

Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI juga sebagai organisasi dalam pembelajaran pendidikan politik. Pendidikan politik dimaksud agar pemuda dapat memandang permasalahan politik lebih rasional, dengan memberikan solusi terhadap permasalahan politik di yang ada di tanah air. Besarnya pembelajaran pendidikan politik di organisasi kepemudaan, menuntut pengelolaan organisasi yang lebih akuntabel. Pemahaman serta penerapan nilai-nilai karakter sebenarnya sangatlah efektif dalam pelaksanaan pendidikan politik generasi muda.

E. PENUTUP

Internaslisasi nilai-nilai karakter pada generasi muda sejak dini merupakan sebuah langkah kongkrit yang harus dilakukan. Dengan mengembangkan nilai dan sikap diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap mental serta perilakunya. Sasaran utama yang diharapkan adalah adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap pemahamannya mengenai pendidikan politik khususnya etika politik.

Nilai-nilai karakter yang dikenal sejak dini selayaknya memberikan kontribusi yang terbaik dalam mengubah *mindset* pandangan politik pemuda menjadi pendidikan politik yang sehat dan bertanggungjawab.. Pada hakikatnya, pendidikan nilai/karakter di dalam pendidikan politik sudah terinternalisasi melalui etika politik maupun moral politik.. Dengan memberikan pemahaman yang benar dengan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter melalui pendidikan politik maka kita akan menciptakan generasi yang bermoral ketika dia memasuki kancah politik nantinya. Oleh karena itu, dalam kondisi



bagaimanapun juga, bagi pemuda, politik itu harus dituntun oleh moral, agar para pelaksana politik tidak menjadi sewenang-wenang, mau kuasa sendiri dan menang sendiri. Maka kesadaran moral ini perlu ditumbuhkan secara subur di hati sanubari generasi muda.

Strategi pengembangan nilai karakter dalam pendidikan politik oleh generasi muda dapat dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan, serta organisasi kepemudaan. Internalisasi nilai-nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan agar tercapainya pendidikan politik generasi muda merupakan sesuatu yang sangatlah tepat.

Pendidikan politik yang diajarkan di dalam pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai pegangan dalam menciptakan kondisi dimana generasi muda dapat memahami etika politik yang lebih bijak dan transparan. Dengan demikian maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan nilai-nilai karakter pada pendidikan politik dan moral bangsa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat.

Besarnya pembelajaran pendidikan politik di organisasi kepemudaan, menuntut proses manajemen didalamnya lebih akuntabel sehingga, nilai-nilai karakter dapat membimbing pola pikir pemuda untuk memahami serta mengaktualisasikan politik ketika mereka terjun ditengah-tengah masyarakat kelak.

Kepemimpinan pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan Negara bangsa dan agama. Selain itu pemuda mempunyai peran sebagai pendekar intelektual dan sebagai pendekar social. Keberadaan pemuda merupakan simbol kekuatan dan perubahan. prestasi terus saja ditorehkan dengan tinta emas dalam lembar-lembar sejarah masa lalu sampai hari ini



Kemampuan pemuda dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ke global depan sedianya harus datang dari kalangan pemuda itu sendiri. Pembentukan pemuda yang hatinya berkobar sebagaimana diinginkan oleh Soekarno untuk mengguncang dunia tidak dapat dilahirkan apabila tidak ada inisiatif dan kesadaran dari kalangan pemuda sendiri untuk mengupgrade dirinya sendiri karena begitu besarnya tantangan dunia ke depan. Dan yakinlah bahwa sejarah dunia akan ditentukan oleh sejarah pemudanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Pemuda dan Perubahan Social*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Pers.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa Konsep Pendidikan Moral: Landasan Konsep Dasardan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mulyana Rahmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Suryadi A, Budimansyah, D. 2009. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional : Konsep, Teori, Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Widya Aksara Pers.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003.
- Winataputra, U.S dan Budimansyah D. (2007). *Civic Education: Landasan, Konteks, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.
- Winataputra, US. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. Desertasi SPs UPI
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Politikus_Indonesia.
- http://id.gubuk.sabda.org/pemuda_dan_krisis_zaman.